

**Authors**

Ovi Andaresta  
Imron  
Leo Andi Guna

**Affiliation**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah  
Palembang

**Corresponding Email**

[imron\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:imron_uin@radenfatah.ac.id)

**Gerakan Politik Pemuda Demokrat  
Indonesia Dalam Proses  
Pendampingan Masyarakat Desa  
Pedamaran VI Kabupaten Ogan  
Komerling Ilir**

**Abstrak**

Partisipasi politik di tingkat pedesaan sering kali terhambat oleh asimetri informasi dan hegemoni elite lokal dalam pengelolaan anggaran publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika gerakan politik Pemuda Demokrat Indonesia (PDI) dalam pendampingan masyarakat di Desa Pedamaran VI, Kabupaten Ogan Komerling Ilir. Fokus penelitian diarahkan pada tiga dimensi: repertoar bentuk gerakan politik, faktor motivasi organisasional, serta implikasi pendampingan terhadap kesadaran dan kontrol sosial warga. Menggunakan metode kualitatif berpendekatan studi kasus intrinsik, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci (pimpinan organisasi, perangkat desa, tokoh adat, serta perwakilan pemuda dan warga) yang dipilih secara *purposive*, serta diperkuat dengan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan politik PDI beroperasi melalui spektrum aksi ekstra-parlementer/non-elektoral, mencakup pengawasan partisipatif anggaran Dana Desa, fasilitasi advokasi, unjuk rasa damai, serta literasi politik berbasis diskursus. Motivasi organisasi berakar pada dorongan moral-ideologis mewujudkan transparansi tata kelola anggaran dan merespons keluhan warga atas indikasi penyimpangan, sekaligus memperkuat legitimasi peran sosial masyarakat sipil di akar rumput. Pendampingan ini berhasil mentransformasi orientasi kognitif dan psikologis warga menuju keberanian bersuara di Musyawarah Desa, meskipun dampaknya terhadap transparansi struktural pemerintah desa masih terbatas.

**Kata Kunci**

Gerakan Politik, Pemuda Demokrat Indonesia, Partisipasi Non-Elektoral, Pendampingan Masyarakat, Transparansi Dana Desa

## PENDAHULUAN

Desentralisasi tata kelola desa pasca-pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014—yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa—menempatkan desa sebagai entitas otonom yang memegang kendali atas alokasi fiskal substansial berupa Dana Desa. Transformasi kebijakan ini mengidealkan pergeseran paradigma dari model *top-down* menuju mekanisme partisipatif *bottom-up* yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Kendati demikian, berbagai literatur tata kelola pedesaan kontemporer mengonfirmasi bahwa desentralisasi fiskal belum secara otomatis berkorelasi linier dengan akuntabilitas dan keterbukaan publik (Antlöv et al., 2016). Di banyak pedesaan Indonesia, institusi demokrasi formal kerap dibajak oleh jaringan patron-klien dan dominasi oligarki lokal, di mana elite birokrasi desa memonopoli arus informasi anggaran sementara warga diletakkan pada batas partisipasi simbolis (*pseudo-participation*) (Scott, 1972; Berenschot, 2021).

Ketimpangan struktural ini diperberat oleh rendahnya literasi politik warga yang membatasi kapasitas kognitif dan daya evaluatif publik dalam mengawasi APBDes (Almond & Verba, 2015; Fox, 2015). Dalam konstelasi tersebut, kehadiran organisasi kemasyarakatan (Ormas) sebagai pilar masyarakat sipil (*civil society*) menjadi krusial dalam menjembatani ruang antara negara dan warga (Cohen & Arato, 1992; Nugroho, 2017). Walaupun sejumlah kajian mutakhir mengkritik pergeseran Ormas yang kian terkooptasi oleh kepentingan teknokratis dan proyek donor (Salamon et al., 2017), segmen organisasi kepemudaan tertentu tetap konsisten mengadopsi gerakan akar rumput berorientasi advokasi keadilan distributif.

Fenomena krusial ini terpotret di Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Dinamika politik lokal desa ini memuncak dengan eskalasi tuntutan transparansi alokasi Dana Desa yang berujung pada aksi unjuk rasa warga pada tahun 2024, di mana Pengurus Cabang dan Anak Cabang Pemuda Demokrat Indonesia (PDI) tampil aktif mengorganisasi pendampingan hukum dan politik masyarakat. PDI sebagai organisasi kader historis non-partisan memosisikan diri sebagai instrumen kekuatan moral (*moral force*) untuk mengintervensi hegemoni pengelolaan anggaran desa.

Kajian terdahulu mengenai peran lembaga kepemudaan dan pembangunan desa cenderung memfokuskan telaah pada dimensi filantropi sosial (Pratama & Rahmat, 2018), mediasi resolusi konflik horizontal (Rakhman & Haryadi, 2022), maupun efektivitas lembaga institusional formal seperti Karang Taruna, LPMD, dan pendamping teknis kementerian (Suswanto et al., 2019; Nurbaeti et al., 2022). Belum

banyak studi yang secara spesifik mengeksplorasi artikulasi gerakan politik non-elektoral dari Ormas kepemudaan independen dalam mengadvokasi transparansi anggaran publik di tataran lokal.

Berdasarkan celah teoretis dan empiris tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis: (1) Repertoar bentuk gerakan politik yang dijalankan oleh Pemuda Demokrat Indonesia dalam mendampingi warga Desa Pedamaran VI; (2) Struktur motivasi yang mendasari PDI dalam mengintervensi relasi kekuasaan di tingkat desa; dan (3) Dampak pendampingan tersebut terhadap dimensi kognitif, psikologis, serta kapasitas kontrol sosial masyarakat atas tata kelola pemerintahan desa.

Analisis dalam penelitian ini didukung oleh integrasi tiga pilar konseptual:

- 1) Teori Gerakan Politik dan Politik Kontestasi (*Contentious Politics*): Mengacu pada Charles Tilly (2004) dan Sidney Tarrow (2015), gerakan politik didefinisikan sebagai mobilisasi kolektif terorganisir yang memanfaatkan struktur peluang politik (*political opportunity structure*) untuk melayangkan klaim hak serta memengaruhi pemegang otoritas di luar jalur pemilu. Van Stekelenburg dan Walgrave (2018) memetakan dinamika ini ke dalam tiga faktor utama: kesadaran atas ketimpangan (*motivational factor*), ketersediaan ruang dialog/konflik (*opportunity factor*), dan instrumen jaringan pengorganisasian (*mobilization factor*).
- 2) Teori Partisipasi dan Kesenjangan Politik: Almond dan Verba (2015) serta Teorell (2016) menegaskan bahwa partisipasi politik memerlukan kesetaraan akses informasi (*political equality*). Partisipasi modern tidak hanya bergerak di ranah konvensional (musyawarah institusional), melainkan mencakup ranah non-konvensional seperti protes publik, mobilisasi komunitas, dan kontrol akuntabilitas sosial (Fox, 2015; Kahne & Bowyer, 2018).
- 3) Dimensi Pemberdayaan Kritis (*Community Empowerment*): Robert Chambers (1997; 2017) memandang pemberdayaan sebagai penguatan kesadaran kritis (*critical consciousness*) dan kapasitas warga untuk menguasai keputusan hidup mereka. Secara operasional, Lea (2021) mengkristalisasi pemberdayaan ke dalam empat pilar: kognitif (pengetahuan), psikologis (keberanian bertindak), sosial (solidaritas kolektif), dan struktural (transformasi relasi kuasa kelembagaan).

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan studi kasus dipilih guna memperoleh pemahaman komprehensif, mendalam, dan kontekstual mengenai interaksi antara gerakan politik PDI, aparatur desa, dan dinamika sosio-politik warga di lokus penelitian (Sugiyono, 2018).

Lokus penelitian bertempat di Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Wilayah ini dipilih secara purposif (*purposive selection*) mengingat lokus tersebut merefleksikan eskalasi konflik sengketa transparansi Dana Desa periode 2023–2024 yang direspon langsung melalui advokasi PDI.

Informan ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dan representasi otoritas struktural/sosial, mencakup:

- 1) Pengurus PDI: Indra (Ketua DPC PDI OKI) dan Ansori Madeli, S.Sos. (Sekretaris PAC PDI Pedamaran).
- 2) Pemerintah Desa: Golok Iki (Sekretaris Desa Pedamaran VI).
- 3) Tokoh Masyarakat/Budaya: Erianto (Tokoh Adat/Pegiat Seni Pedamaran).
- 4) Elemen Warga dan Pemuda: Dika Sukandi (Warga/Peserta Advokasi) dan Putra (Representasi Pemuda Desa).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur (*semi-structured in-depth interview*) serta dokumentasi arsip laporan anggaran Dana Desa, dokumen pelaporan ke Inspektorat OKI dan BPKP Sumsel, regulasi desa, serta data portal pencegahan korupsi JAGA KPK. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tematik berbasis rumusan masalah, triangulasi sumber untuk menjamin validitas, serta penarikan simpulan induktif

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Bentuk Gerakan Politik Pemuda Demokrat Indonesia: Dari Literasi hingga Aksi Ekstra-Parlementer

Berdasarkan data lapangan, gerakan politik yang diinisiasi oleh PDI di Desa Pedamaran VI merupakan artikulasi gerakan politik non-elektoral (*extra-parliamentary political movement*). Gerakan ini tidak berorientasi pada kontestasi perebutan jabatan publik desa, melainkan pada pembongkaran monopoli informasi anggaran yang membatasi hak-hak masyarakat. Spektrum repertoar gerakan PDI terbagi dalam tiga domain:

- a) Edukasi Politik dan Peningkatan Literasi Anggaran: PDI menyelenggarakan forum diskusi kampung, sosialisasi, dan lokakarya advokasi tata kelola keuangan desa. Dalam forum ini, warga diperkenalkan pada dokumen teknis seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), APBDes, serta instrumen pelaporan publik seperti aplikasi JAGA KPK. Temuan wawancara dengan warga menunjukkan bahwa transfer wawasan ini menjadi titik awal terbukanya

pemahaman masyarakat pedesaan terkait hak hukum mereka mengawasi anggaran pembangunan.

- b) **Fasilitasi Ruang Aspirasi dan Mediasi Kritis:** Organisasi mengambil posisi sebagai perantara (*interest intermediation*) yang menghimpun keluhan warga perihal proyek fisik yang mangkrak atau tidak selaras dengan musyawarah dusun. PDI memfasilitasi dialog publik formal dengan pemerintah desa guna mengonfrontasi temuan kejanggalan administratif.
- c) **Advokasi Litigasi dan Mobilisasi Massa Berkelanjutan:** Ketika kanal-kanal komunikasi birokrasi formal menemui jalan buntu (*deadlock*), PDI mengonversi kekecewaan publik ke dalam bentuk mobilisasi aksi damai turun ke jalan pada pertengahan 2024. Tidak berhenti pada unjuk rasa, DPC PDI OKI memperluas saluran perlawanan ke ranah institusi pengawas supra-desa dengan melayangkan laporan dugaan penyelewengan dana ke BPKP Perwakilan Sumatera Selatan serta melakukan audiensi langsung ke Inspektorat Daerah OKI.

Karakteristik gerakan PDI di Desa Pedamaran VI tersebut selaras dengan proposisi Tilly (2004) tentang *contentious politics*. PDI memadukan strategi dialogis (pendidikan warga) dengan strategi konfrontatif terkendali (demonstrasi dan pelaporan inspektorat). Dengan cara ini, PDI mereduksi patronase lokal dan mengubah kebiasaan masyarakat yang semula pasif menjadi kelompok warga yang berdaya tawar di hadapan kekuasaan.

## 2. Struktur Motivasi Organisasi: Konvergensi Dorongan Normatif dan Legitimasi Sosial

Analisis terhadap faktor pendorong keterlibatan PDI membedah bahwa motivasi organisasi tidak bersifat linier, melainkan merupakan sintesis dari sejumlah determinan internal dan eksternal:

**Tabel 1. Tipologi Motivasi Gerakan Pemuda Demokrat Indonesia**

| Dimensi Motivasi   |             | Indikator Lapangan                                                                           |                                                        | Landasan Teoretis |                     |
|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Keadilan Moralitas | Sosial &    | Respons atas dugaan penyimpangan anggaran fisik dan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. | Prinsip distributif; Nilai <i>Ma'ruf Nahi Munkar</i> . | keadilan          | Nilai <i>Amar</i>   |
| Keterbukaan        | Tata Kelola | Dorongan                                                                                     | mendesak                                               | Konsep            | <i>Good Village</i> |

| Dimensi Motivasi                    | Indikator Lapangan                                                                                       | Landasan Teoretis                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ( <i>Governance</i> )               | transparansi APBDes, RKPDDes, dan akuntabilitas elite desa.                                              | <i>Governance</i> (Antlöv et al., 2016).                                               |
| Ideologis & Edukasi Warga           | Kesadaran historis kaum nasionalis-demokratis untuk membina basis massa kritis ( <i>critical base</i> ). | Pendidikan politik emansipatoris (Almond & Verba, 2015).                               |
| Legitimasi & Konsolidasi Organisasi | Upaya membuktikan relevansi eksistensial PDI sebagai jangkar advokasi masyarakat sipil pedesaan.         | Pembentukan modal sosial dan kapasitas mobilisasi (Van Stekelenburg & Walgrave, 2018). |

Secara praksis, PDI bergerak karena terbukanya celah politik (*political opportunity structure*) di Desa Pedamaran VI, yakni meluasnya keresahan warga atas indikasi manipulasi realisasi anggaran yang tidak sesuai RAB. PDI menangkap momentum ini untuk membangun basis kepercayaan rakyat.

Di samping itu, motivasi gerakan ini memiliki resonansi kuat dengan prinsip etika politik Islam. Sebagaimana dikemukakan Rahman (2017) dan Kamali (2019), kontrol publik terhadap kebijakan negara merupakan wujud nyata *amar ma'ruf nahi munkar* yang berorientasi pada kemaslahatan kolektif dan pencegahan korupsi struktural.

### 3. Implikasi Pendampingan terhadap Kesadaran Warga dan Akuntabilitas Desa

Intervensi pendampingan oleh PDI menghasilkan capaian transformatif pada level psikososial warga, kendati dihadapkan pada resistensi institusional aparatur desa:

- Penguatan Kapasitas Kognitif dan Literasi Anggaran: Pengetahuan warga mengenai siklus Dana Desa yang sebelumnya sangat minim mulai terakselerasi. Warga dan pemuda memahami bahwa Dana Desa bernilai miliaran rupiah per tahun (tercatat Rp2,06 miliar pada APBDes 2024 dan Rp1,68 miliar pada 2025) merupakan hak publik yang wajib dipertanggungjawabkan.
- Transformasi Afektif-Psikologis (Efikasi Politik): Dampak paling menonjol terletak pada keberanian menyampaikan pendapat (*psychological empowerment*).

Warga yang dahulunya bungkam karena takut berkonflik dengan perangkat desa, mulai berani mengajukan interupsi dan pertanyaan kritis saat berlangsungnya forum Musyawarah Desa (Musdes). Sekretaris Desa Pedamaran VI mengonfirmasi adanya kenaikan tensi pertanyaan publik terkait peruntukan anggaran fisik.

- c) Konsolidasi Elemen Pemuda: Keterlibatan pemuda desa yang semula apatis mulai bertransformasi ke arah kepedulian pembangunan. Solidaritas antarwarga tumbuh, meminimalisasi ketergantungan individual terhadap relasi patronase kepala desa.

Kendati pendampingan berhasil merekonstruksi partisipasi warga, penelitian ini mengidentifikasi bahwa keberhasilan tersebut belum diikuti perubahan signifikan pada tata kelola internal birokrasi desa. Ketua DPC PDI OKI mengindikasikan bahwa perbaikan sistem transparansi dari pihak aparat desa baru mencapai kisaran 10%. Resistensi birokrasi, minimnya keterbukaan papan informasi anggaran proyek secara komprehensif, serta ketergantungan warga yang masih tinggi terhadap figur pendamping PDI menjadi kendala utama belum tercapainya kemandirian emansipatoris yang utuh.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa gerakan politik yang dilancarkan oleh Pemuda Demokrat Indonesia (PDI) di Desa Pedamaran VI merupakan wujud praksis gerakan ekstra-parlementer yang mengedepankan advokasi kebijakan publik berbasis akar rumput. Bentuk intervensi dilakukan secara bertahap melalui literasi politik desa, pendampingan dialogis, penyampaian tuntutan melalui demonstrasi damai, hingga pelaporan hukum ke BPKP dan Inspektorat Daerah. Motivasi gerakan bersumber dari perpaduan nilai moral keadilan sosial, perlawanan terhadap ketimpangan informasi, serta konsolidasi legitimasi kelembagaan ormas kepemudaan.

Secara sosiologis, pendampingan ini memicu kebangkitan kesadaran kritis dan efikasi diri masyarakat, yang ditandai oleh keberanian warga mengartikulasikan kontrol sosial di ruang-ruang musyawarah desa. Namun demikian, gerakan politik warga ini masih tertahan di hadapan kultur birokrasi pedesaan yang belum responsif dan akuntabel secara sistemik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis memberikan Kesimpulan beberapa hal, yaitu:

- 1) Bagi Pemuda Demokrat Indonesia: Perlu merancang sistem kaderisasi advokasi berkelanjutan (capacity building) bagi pemuda desa setempat agar kontrol sosial tidak bergantung pada elite ormas eksternal, melainkan berakar mandiri pada komunitas warga.
- 2) Bagi Pemerintah Desa: Wajib mematuhi mandat perundang-undangan dengan menyediakan instrumen keterbukaan informasi publik desa (baliho APBDes real-time, sistem informasi desa, forum musyawarah terbuka) guna mereduksi prasangka negatif dan potensi sengketa hukum.
- 3) Bagi Peneliti Selanjutnya: Disarankan mengkaji dampak gerakan politik ormas lokal melalui pendekatan studi komparatif multi-desa atau menggunakan analisis sosiologi jaringan kekuasaan (*network governance*) untuk meneliti efektivitas intervensi lembaga pengawas supra-desa terhadap tata kelola desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. A., & Verba, S. (2015). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. London: Sage Publications.
- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village governance, community life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161–183. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047>
- Berenschot, W. (2021). *Democracy for Sale: Clientelism in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. London: Intermediate Technology Publications.
- Chambers, R. (2017). *Can We Know Better? Reflections for Development*. Rugby: Practical Action Publishing.
- Cohen, J. L., & Arato, A. (1992). *Civil Society and Political Theory*. Cambridge: MIT Press.
- Fox, J. A. (2015). Social accountability: What does the evidence really say? *World Development*, 72, 346–361. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.03.011>
- Ginting, G., Kuswandi, A., & Budiati, A. (2024). *Pembangunan Desa dan Partisipasi Warga*. Jakarta: Pustaka Obor.
- Kahne, J., & Bowyer, B. (2018). The political significance of social media activity in the 2016 election. *Political Communication*, 35(3), 470–493.
- Kamali, M. H. (2019). *Good Governance and Islam: Principles and Practices*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Lea, V. (2021). *Dimensions of Community Empowerment in Local Governance*. London: Routledge.

- Nugroho, Y. (2017). *State–Civil Society Relations in Indonesia: A Contemporary Analysis*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Nurbaeti, E., Engkus, E., & Nur, M. (2022). Peranan LPM dalam pembangunan di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(9), 2991–2998.
- Pratama, A. B., & Rahmat, H. (2018). Peran Karang Taruna dalam mewujudkan tanggung jawab sosial pemuda sebagai gerakan warga negara. *Jurnal Civics: Kajian Kewarganegaraan*, 15(2), 173–182.
- Rahman, A. (2017). Etika politik Islam dan akuntabilitas publik. *Jurnal Politik Islam Kontemporer*, 8(1), 45–62.
- Rakhman, F., & Haryadi, P. (2022). Peran pemuda dalam penyadaran konflik di Kota Ambon (Studi kasus: Komunitas Non-Violent Study Circle). *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 10(1), 55–68.
- Rosser, A., & Bebbington, M. (2020). Collective action and social accountability in rural Indonesia. *Development Policy Review*, 38(4), 481–498.
- Salamon, L. M., Sokolowski, S. W., & Haddock, M. A. (2017). *Explaining Civil Society Development: A Social Origins Approach*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Scott, J. C. (1972). Patron-client politics and political change in Southeast Asia. *American Political Science Review*, 66(1), 91–113. <https://doi.org/10.2307/1959280>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suswanto, B., Windiasih, R., Sulaiman, A., & Weningsih, S. (2019). Pendampingan masyarakat dan pemberdayaan desa berbasis *Participatory Rural Appraisal*. *Sosio Konsepsia*, 8(3), 215–228.
- Tarrow, S. (2015). *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics* (Updated ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Teorell, J. (2016). *Participation and Political Equality*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tilly, C. (2004). *Social Movements, 1768–2004*. Boulder: Paradigm Publishers.
- Van Stekelenburg, J., & Walgrave, S. (2018). *Contemporary Social Movements and Political Participation*. Cambridge.